

BAB 1

PENDAHULUAN

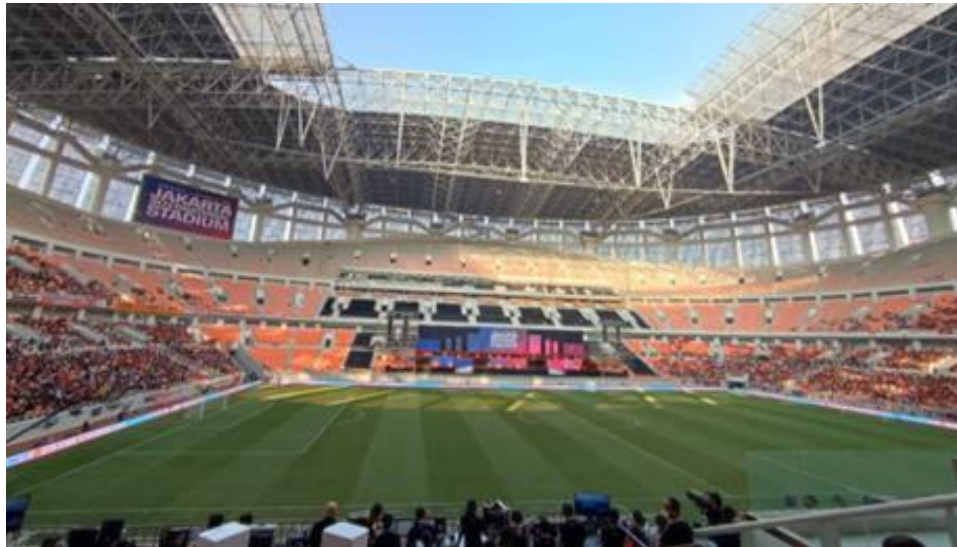
1.1. Latar Belakang

Harapan Pembangunan infrastruktur besar di kota-kota metropolitan, seperti Jakarta, sering kali melibatkan penggusuran terhadap permukiman penduduk di suatu tempat. Salah satu proyek yang mencerminkan dinamika ini adalah pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang telah menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan Ibu kota DKI Jakarta karena terdapat polemik yang besar dalam proses pembangunannya.

Stadion bertaraf internasional yang dibangun khusus untuk menjadi rumah bagi klub kebanggaan ibukota, Persija Jakarta telah diresmikan pada Minggu, 24 Juli 2022. Stadion yang menampung kurang lebih 82.000 penonton dengan konsep modern yang dibuat mirip dengan Allianz Arena Stadium markas klub liga Jerman Bayern Munchen menghabiskan dana hingga lima triliun dalam pembangunannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merencanakan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai fasilitas olahraga modern yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur olahraga di Ibu Kota Jakarta.

Stadion milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh BUMD PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) diresmikan oleh gubernur Anies Baswedan menjadi stadion pertama di Indonesia yang menerapkan konsep ramah lingkungan dan sustainability. Hal tersebut menjadikan JIS kebanggaan besar

masyarakat Ibu kota sekarang ini dikarenakan stadion tersebut merupakan ikon baru Jakarta yang menerapkan inovasi dalam pembangunannya.



Gambar 1. Peresmian Jakarta International Stadium (JIS)

Sumber: tvonenews.com, 2022

Dilansir oleh Putri (2022) melalui website resmi jakarta smart city, acara peresmian Jakarta International Stadium (JIS) yang diselenggarakan pada 24 Juli 2022 disiarkan langsung dari *channel* Youtube DKI Jakarta dan CNN Indonesia dibuat sangat meriah dan dihadiri langsung ribuan masyarakat Jakarta. Peresmian tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh Tantri, vokalis band Kotak. Kemudian, dilanjutkan dengan penampilan meriah dari Band Legendaris tanah air, Dewa 19 *featuring* Virzha yang membawakan lagu hitsnya, dari “Separuh Nafas”, “Kamulah Satu-Satunya”, hingga “Roman Picisan”.

Kemeriahan dalam peresmian stadion tersebut berlanjut dengan pertandingan Persija Jakarta melawan Chonburi FC klub asal Thailand yang

berakhir dengan skor imbang antara kedua tim. Rangkaian peresmian Jakarta International Stadium kemudian ditutup dengan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyampaikan pesan untuk selalu mendukung dan menjaga stadion kelas dunia yang menjadi kebanggaan warga Jakarta, terutama pendukung setia klub sepak bola Persija Jakarta, The Jak Mania.

Dibalik kemegahan Jakarta International Stadium, realita memperlihatkan bahwa pembangunan JIS menimbulkan kontroversi yang tidak kunjung terselesaikan. Kisah dari sebuah komplikasi dimulai saat Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT. Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu di Wilayah Kota DKI Jakarta. Pembangunan kawasan olahraga ini direncanakan adanya penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat yang didalamnya terdapat stadion olahraga bertaraf internasional serta dilengkapi fasilitas pendukung, seperti transportasi umum, fasilitas multi kegiatan, dan ruang terbuka hijau.

Apabila catatan kronologis pembangunan infrastruktur ini ditarik lebih panjang, realisasi pembangunan kawasan olahraga yang awal mula dibangun kembali pada 14 Maret 2019 oleh Gubernur Anies Baswedan merupakan proyek lanjutan yang sudah dirancang oleh eks-Gubernur Fauzi Bowo. Stadion ini sudah mulai memasuki tahap awal pembangunan pada tahun 2009 di kawasan Taman Bersih Manusia Wibawa (BMW) dengan luas pembangunan 66,5 hektare. Kawasan tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal

dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum tujuh perusahaan swasta.

Pada awal Oktober 2008, sekitar 26,5 hektare dari 66,5 hektare yang tersedia berhasil diokupasi untuk pembangunan stadion BMW (Sari & Gatra, 2019). Pemprov DKI Jakarta mengusir pemukiman liar di sekitar taman BMW, menyebabkan pertikaian antara penduduk setempat dengan pemerintah. Sekitar dua ratus lebih rumah digusur secara paksa oleh pemerintah, karena warga dinilai tidak memiliki hak untuk bermukim di lokasi tersebut. Penduduk setempat kemudian mengajukan usulan kepada pemerintah untuk menyediakan relokasi pembangunan dengan menyediakan lahan tempat tinggal baru. Namun, pada saat itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bertanggung jawab atas penggusuran tersebut.

Pada tahun 2009, proyek pembangunan stadion BMW gagal karena perselisihan dengan penduduk setempat bernama Donald Guilaime Wolfe. Donald (2010) mengklaim bahwa sebagian tanah Taman BMW adalah warisan dari keluarganya dan telah diakuisisi oleh pemerintah. Kemudian, masalah sengketa lahan pun terus berlanjut hingga akhir masa jabatan Gubernur Fauzi Bowo.

Beralih kepada kepemimpinan Jokowi-BTP sebagai Gubernur DKI Jakarta. PT. Buana Permata Hijau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta pada Jumat 18 Juli 2014, pihaknya mengklaim bahwa sebagian lahan seluas 69.472 m² yang diakuisisi pemerintah untuk Stadion BMW merupakan milik PT. Buana Permata Hijau hibah dari PT. Sri Domes pada 16 November 1984 silam (Wildan, 2019).

Dikutip melalui republika.id (2020) permasalahan sengketa antara PT. Buana Permata Hijau dengan Pemprov DKI Jakarta terus berlanjut hingga tahun 2019 dengan berbagai gugatan dan banding diajukan oleh kedua pihak untuk mendapatkan hak atas lahan tersebut, hingga memasuki tahap akhir pada 30 September 2019, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) membuat keputusan bahwa dinyatakan secara sah Pemprov DKI Jakarta berhak atas lahan seluas 69.472 m² tersebut. Dengan terbitnya keputusan ini, Pemprov DKI Jakarta berhak melanjutkan pembangunan infrastruktur stadion BMW yang sekarang berganti nama menjadi Jakarta International Stadium.

Direalisasikan proyek pembangunan infrastruktur kawasan olahraga terpadu yang ditargetkan menjadi kawasan olahraga bertaraf internasional, pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) memerlukan lahan yang sangat luas di ujung utara Kota Jakarta. Dilihat dari Peraturan Gubernur yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta, proyek ini memerlukan lahan seluas 265.335,99 m² (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan meter persegi) di jalan Sunter Permai, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara (Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu, 2019). Besarnya luas lahan yang diperlukan untuk membangun infrastruktur olahraga ini, mengharuskan adanya penggusuran atau pembebasan lahan di pemukiman warga agar pembangunan ini segera dilaksanakan.

Komarudin (1999) dalam bukunya yang berjudul pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan, mengidentifikasi bahwa terdapat enam masalah pembangunan DKI Jakarta. Keenam masalah tersebut meliputi luas kota, pengelolaan kota, sumber daya manusia yang dimiliki kota, arah pertumbuhan atau perkembangan kota, penunjang pertumbuhan kota, serta cara atau metode yang tepat untuk menjadikan Jakarta sebagai kota praja.

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka proses penggusuran atau pembebasan lahan di wilayah masyarakat yang tinggal di daerah tempat pembangunan harus menjadi korban dari proyek infrastruktur itu sendiri. Pada fenomena ini, pembangunan kawasan olahraga terpadu Jakarta International Stadium menjadi sebab adanya relokasi paksa yang dilakukan di wilayah Kampung Bayam, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, yang harus menerima realitas penggusuran.

Runtutnya, permasalahan penggusuran lahan yang memiliki dampak kepada warga kota, menunjukkan bahwa peristiwa ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah mengenai relokasi warga yang terdampak pembangunan. Jika, pengosongan lahan dilakukan melalui penggusuran secara paksa, maka cenderung mengabaikan hak asasi manusia. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah pemenuhan hak untuk tempat tinggal yang layak bagi warga kota, memastikan keberlanjutan hidup warga demi kemanusiaan, serta jaminan pemberian kompensasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah setempat.

Merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Asian Development Bank (ADB) bahwa proses pengosongan lahan akibat pembangunan infrastruktur, pemerintah harus memberikan kompensasi dari kehilangan aset-aset, sumber penghidupan, dan pendapatan, merelokasi kelompok terdampak dengan fasilitas dan pelayanan yang tepat, serta membentuk dan membina dalam hal rehabilitasi sampai tingkat kesejahteraannya mencapai sekurang-kurangnya sama dengan pra-proyek. Pelaksanaan pengosongan tanah tanpa adanya partisipasi dari masyarakat lokal, aparat keamanan, dan tidak adanya mekanisme untuk mengatasi dampak ekonomi, sosial dan budaya terhadap masyarakat yang terkena dampak penggusuran, maka situasi tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. (Asian Development Bank, 1995)

Hingga awal tahun 2023, masih banyak warga yang menempati area sekitar Jakarta International Stadium, yaitu penduduk Kampung Bayam. Warga memilih untuk tetap bertahan di pinggiran rel kereta merupakan entitas kecil karena tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan tempat tinggalnya atau melawan kebijakan penggusuran yang dilakukan pemerintah. Fakta di lapangan menyatakan hingga saat ini, terdapat dua kelompok masyarakat yang lahir akibat dari penggusuran tersebut, yaitu kelompok yang memutuskan bertahan dengan membuat rumah gubuk dilapisi tenda biru dan kelompok yang memilih pergi dengan berbagai kompensasi yang dijanjikan oleh pemerintah.

Permasalahan semakin rumit saat entitas atau kelompok kecil masyarakat Kampung Bayam yang bertahan di sekitar area pembangunan JIS saat proses pembangunan berlangsung. Mereka adalah kelompok yang menolak untuk

meninggalkan huniannya dan masih menunggu uang kompensasi yang dijanjikan oleh pihak PT. Jakarta Propertindo (Jakpro).

Mengutip kisah yang diwartakan oleh Bhagavad (2021) melalui media tirto.id, Bhagavad memaparkan kondisi warga Kampung Bayam yang memilih untuk bertahan di tepi tembok pembatas proyek pembangunan.



Gambar 2. Kondisi Hunian Kampung Bayam Jakarta Setelah Penggusuran

Sumber: tirto.id, 2021

Mereka memilih untuk melanjutkan hidupnya di lingkungan dengan kondisi tidak layak huni. Warga menggunakan sumur dangkal yang tercemar sampah sebagai sumber air sehari-hari. Terdapat jalan setapak yang tergenang air dan sebagian besar air genangan tersebut masuk ke dalam rumah, hampir seluruh rumah warga terendam air yang membuat lantai rumah selalu basah sampai genangan semata kaki, warga setempat menangani genangan tersebut dengan meletakkan puing-puing beton di dalam rumah sebagai tempat berpijak agar kaki

tidak tergenang ke dalam air. Mirisnya, anak-anak yang hidup di sekitaran gubuk tersebut bermain di genangan air yang tercemar sampah. Namun, melihat kondisi tidak layak tersebut, warga setempat tetap bergotong royong dan aktif melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan lokasi hunian mereka.

Walaupun sebagian entitas kecil masyarakat Kampung Bayam memilih bertahan dengan kondisi tidak layak tersebut, pengelola tidak kunjung memberikan kejelasan terhadap kompensasi yang dijanjikan. Adapun, klaim yang dilakukan oleh Jakpro mengenai tindak lanjut pemberian kompensasi kepada warga tergusur. Sebagaimana diberitakan oleh Fauzi (2023) melalui media antaranews.com, pernyataan mengenai kompensasi disampaikan oleh Syachrial Syarief selaku sekretaris PT. Jakarta Propertindo (Jakpro). Syachrial mengatakan bahwa Jakpro telah memberikan kompensasi kepada 642 penduduk yang terdampak pembangunan pada tahun 2021.

Dilansir dari antaranews.com (2023) protes disampaikan oleh sekretaris DPC Taruna Merah Putih (TMP) Jakarta Utara, Niko Atmaja mengenai pernyataan Jakpro bahwa pihaknya telah menyelesaikan kompensasi kepada warga eks-Kampung Bayam. Niko Atmaja menyatakan keterangan bahwa masih ada sekitar 600 warga yang belum menerima kompensasi dari Jakpro. Namun, setelah dikonfirmasi oleh Jakpro masyarakat yang masih bermukim di wilayah tersebut bukanlah penduduk asli Kampung Bayam sehingga bukan menjadi tanggung jawab pihak Jakpro.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi permasalahan relokasi tersebut dengan membangun Kampung Susun Bayam (KSB) yang dikelola PT.

Jakarta Propertindo (Jakpro). Kampung Susun Bayam diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan pada Rabu, 12 Oktober 2022. PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) membangun tiga tower berlantai empat dengan total 138 unit hunian dengan waktu pengerjaanya empat bulan dua puluh hari yang diawali peletakan batu pertama pada Kamis, 7 April 2022.



Gambar 3. Potret Bangunan Kampung Susun Bayam

Sumber: rakyatmedia.id, 2022

Meskipun Kampung Susun Bayam sudah diresmikan, tetapi unit hunian baru tersebut masih menghadapi masalah operasional. Polemik yang terjadi adalah keresahan yang dialami oleh calon penghuni Kampung Susun Bayam (KSB) karena pemerintah menjanjikan warga dapat menempati KSB pada 20 November 2022. Namun, hingga awal tahun 2023 calon penghuni masih belum menempati hunian tersebut.

Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB) melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 2 Februari 2023 untuk menuntut

haknya segera dipenuhi. Dilansir melalui news.republika.co.id (2023), warga meminta bantuan Presiden RI melalui perwakilan LBH Jakarta. Menurut Jihan (2022) selaku perwakilan LBH Jakarta, warga telah mengajukan banding administratif kepada Pemprov DKI Jakarta dan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro). Selain itu, banding tersebut juga dikirim ke Sekretariat Presiden untuk meminta Pemprov DKI memenuhi empat tuntutan yang diajukan kepada PT. Jakarta Propertindo (Jakpro). Isi dari tuntutan tersebut yakni:

- 1) Pemprov DKI Jakarta dan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) segera memberikan unit Kampung Susun Bayam sebagai bentuk pemulihan hak bagi warga Kampung Bayam yang mengalami penggusuran.
- 2) Pemprov DKI Jakarta dan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) harus menjamin warga Kampung Bayam dapat menghuni Kampung Susun Bayam dengan harga terjangkau.
- 3) Pemprov DKI Jakarta dan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) harus menjamin bahwa warga mendapatkan hak pengelolaan Kampung Susun Bayam.
- 4) Pemprov DKI Jakarta dan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) harus menjamin terpenuhinya hak atas tempat tinggal yang layak bagi warga Kampung Bayam dengan tidak melakukan kembali penggusuran kepada warga yang saat ini diajukan belum mendapat hak atas unit Kampung Susun Bayam.



Gambar 4. Demonstrasi PWKB Kampung Bayam di Depan Balai Kota DKI Jakarta

Sumber: detiknews.com, 2023

PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) menanggapi tuntutan calon penghuni Kampung Susun Bayam. Dalam tanggapannya, Hifdzi Mujtahid dari Community Development PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), menjelaskan “ada beberapa proses yang harus dilewati sebelum warga dapat menempati hunian tersebut, termasuk administrasi”. Jakpro menyatakan bahwa tarif sewa KSB sebagai pemukiman kembali warga tergusur harus berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. Dalam peraturan itu, disebutkan biaya sewa unit sebesar 1.500.000 per bulan, tetapi warga menolaknya.

Menanggapi biaya sewa tersebut, Asep Suwenda, Ketua Koperasi Perkumpulan Warga Kampung Bayam (KPWB), menawarkan penurunan biaya sewa menjadi, tetapi Jakpro tidak menyepakati nominal tersebut. Pada situasi ini,

negosiasi yang dilakukan oleh warga dengan pihak pengelola tidak mencapai kesepakatan sehingga hunian KSB masih belum bisa dihuni oleh warga terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Persoalan biaya operasional yang masih belum mendapatkan titik temu menjadi hambatan masyarakat kampung bayam, fakta lapangan bahwa hunian Kampung Susun Bayam (KSB) yang dijanjikan untuk ditempati warga terdampak pembangunan sekarang menjadi tempat tinggal pengelola JIS. Perjanjian yang tertuang dalam materai yang ditanda tangani oleh warga Kampung Bayam dengan pihak Jakpro menjadi landasan kepercayaan masyarakat atas janji kompensasi yang akan diberikan.

Pengelola infrastruktur Jakarta International Stadium PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) mendasari kompensasi yang diberikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Namun, realitanya hingga bulan September 2023, kompensasi yang dijanjikan oleh PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola JIS belum dituntaskan.

Terdapat konflik yang rumit antara pemerintah dan warga Kampung Bayam sehingga terjadinya penggusuran yang menimbulkan polemik seperti ini. Pemerintah memiliki kekuatan institusional dan sumber daya finansial yang kuat, sementara warga Kampung Bayam mencoba mempertahankan hak mereka melalui solidaritas dan perlawanan kolektif. Untuk memahami konflik sosial dan politik yang muncul selama proses pembangunan kawasan olahraga terpadu di

DKI Jakarta, penting untuk membicarakan proses konflik dalam konteks pengusuran ini.

Analisis konflik sosial antara pemerintah dan warga Kampung Bayam terkait pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) menjadi topik penelitian yang relevan untuk dikaji. Studi ini dapat mengidentifikasi proses konflik, melihat hubungan dan dinamika antara pemerintah dan warga dalam konteks pengusuran, serta menggali pandangan mengenai dampak sosio-psikologis dan ekonomi masyarakat korban pengusuran.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika proses konflik relokasi warga Kampung Bayam dalam pembangunan Jakarta International Stadium (JIS)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

- a) Menganalisis proses konflik yang terjadi. Penelitian ini akan mengidentifikasi sumber konflik, pola interaksi antara pemerintah, pengelola, dan warga, serta strategi yang digunakan oleh masing-masing pihak untuk mencapai tujuan mereka.
- b) Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat konflik, seperti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengelola pembangunan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB), dan kelompok kepentingan lainnya.

- c) Menganalisis manajemen konflik atau resolusi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemilik infrastruktur dalam memenuhi tuntutan yang disampaikan oleh warga eks-Kampung Bayam. Dalam konteks ini, penulis akan memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi eskalasi atau penyelesaian konflik tersebut, termasuk peran media, dukungan masyarakat, dan upaya mediasi atau negosiasi yang dilakukan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - 1) Memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang hubungan kekuasaan antara pemerintah dan warga dalam konteks relokasi paksa. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kekuasaan dalam situasi ini, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang kekuasaan serta dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kekuasaan berperan dalam konflik sosial.
 - 2) Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kekuasaan berperan dalam dinamika konflik antara Pemerintah dan warga Kampung Bayam.

- 3) Memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi eskalasi atau penyelesaian konflik sosial dalam konteks pembangunan infrastruktur.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Memberikan wawasan dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam mengelola konflik terkait relokasi paksa. Rekomendasi ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih berkelanjutan, mempertimbangkan kepentingan warga, dan meminimalkan dampak negatif dari relokasi paksa.

2) Bagi Pengelola Infrastruktur

Menjadi pembelajaran berharga bagi proyek-proyek pembangunan infrastruktur serupa di masa depan. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dan dampak relokasi paksa, penelitian ini dapat membantu dalam merancang strategi pengelolaan konflik yang lebih efektif dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat akibat pembangunan infrastruktur.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penanganan konflik penggusuran masyarakat dampak pembangunan infrastruktur pemerintah dengan meneliti secara detail proses dan perkembangan konflik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi sumber rujukan untuk menambah referensi mengenai penelitian dengan topik yang serupa.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu dalam penelitian yang sedang dilakukan, memiliki tujuan untuk memperdalam dan mengembangkan kerangka teori yang digunakan. Berikut merupakan tabel dari penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Boboy, J. T. B., dkk (2020)	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin.	Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian masalah sengketa tanah dengan cara mediasi sesuai dengan teori Dean dan Rubin.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan socio legal secara deskriptif analitis.	Diperoleh hasil penyelesaian berupa mediasi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dean dan Rubin dilakukan dengan cara melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama berupa mufakat dengan melibatkan mediator dan peradilan tinggi.
2.	Ridha Wahyuni . (2022)	Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal	Untuk membahas mengenai perlindungan	Metode yang digunakan adalah yuridis-	Diperoleh hasil penelitian bahwa Pemerintah

		yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran.	hak atas tempat tinggal yang layak di RT/RW 03/03 Batu Ceper, Tangerang sebagai warga terdampak penggusuran akibat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.	empiris, yakni pengkajian ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam realitas sosial.	Kota Tangerang menyediakan rusunawa untuk warga yang terdampak penggusuran. Namun, penawaran tersebut ditolak oleh warga setempat karena ketiadaan proses <i>resettlement</i> yang baik dan sesuai hak asasi manusia, yaitu aspek keterjangkauan biaya, dan aspek lokasi.
3.	Christian i K.M. Merentek. (2023)	Viktimisasi Perkotaan: Moral Panic Korban Penggusuran Kampung Bayam sebagai akibat Pembangunan Jakarta International Stadium.	Untuk membahas mengenai penggusuran dari perspektif kriminologi, di mana warga Kampung Bayam dilihat sebagai korban dari proses viktimisasi atas penggusuran tanahnya untuk pembangunan Jakarta International Stadium.	Metode yang digunakan adalah studi literatur atau dengan cara mencari referensi-referensi yang relevan dari jurnal, surat kabar, artikel, buku, peraturan, dan tinjauan literatur.	Diperoleh hasil penelitian bahwa kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Kampung Bayam dalam aspek finansial, sosial, dan psikologis. Hal tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh penegak hukum.

4.	Wildan Mufti, M., Sani, R., & Ikhsan, M. Hiroshi. (2024)	Analisis HAM Terhadap Penggusuran Masyarakat Kampung Bayam yang Dilakukan Pemerintah Daerah.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggusuran masyarakat Kampung Bayam akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan implementasi konsep Negara Kesejahteraan seperti yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan konseptual (<i>conceptual approach</i>). Peneliti menganalisis regulasi, prinsip hukum, serta doktrin terkait isu penggusuran untuk memahami pelanggaran HAM yang terjadi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggusuran warga Kampung Bayam tanpa perencanaan dan kompensasi yang memadai berdampak negatif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Konflik timbul akibat kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah, pengembang, dan warga terkait status tinggal dan kompensasi.
5.	Khoerunisa, R., & Virianita, R. (2023)	Persepsi dan Kapasitas Adaptif Warga Terdampak Penggusuran Proyek Jalur Ganda Kereta Api Bogor-Sukabumi (Kasus di Wilayah Relokasi RT 04/RW 01 Kelurahan Bojongkerta	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi terhadap kapasitas adaptif warga yang terdampak penggusuran proyek jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi. Fokusnya adalah	Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data kualitatif sebagai pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terhadap 52 responden dari wilayah relokasi dan wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi warga terhadap dampak penggusuran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kapasitas adaptif mereka. Namun, hubungan negatif mengindikasikan bahwa

		, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat)	memahami bagaimana persepsi warga terhadap dampak pengusuran memengaruhi kemampuan adaptasi mereka dalam menghadapi perubahan.	mendalam dengan informan. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana untuk mengevaluasi hubungan antara persepsi dan kapasitas adaptif.	persepsi buruk terhadap dampak pengusuran cenderung meningkatkan kapasitas adaptif. Sebagian besar warga memiliki kapasitas adaptif pada tingkat sedang, menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan dampak pengusuran proyek jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi.
--	--	--	--	---	---

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terlihat adanya perbedaan fokus dan pendekatan antara hasil studi pustaka yang dikumpulkan dengan riset yang sedang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat digarisbawahi:

1) Fokus Penelitian

Dari hasil penelitian terdahulu, pembahasan lebih berfokus pada aspek perlindungan hak asasi manusia dalam kasus pengusuran. Sementara itu, peneliti lebih tertarik untuk mendalami proses terjadinya konflik akibat relokasi paksa, penanganan atau resolusi konflik, serta peran dan strategi

aktor-aktor yang terlibat, termasuk masyarakat korban penggusuran dalam memperjuangkan kompensasi.

2) Pendekatan Penelitian

Hasil penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif atau hukum dalam membahas isu penggusuran, dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan peneliti cenderung menggunakan pendekatan sosial-politik atau konflik dalam mengkaji proses, dinamika, dan resolusi konflik yang terjadi dalam kasus penggusuran.

3) Peran Aktor

Peneliti ingin menganalisis lebih jauh peran dan strategi yang digunakan oleh berbagai aktor yang terlibat dalam kasus penggusuran, seperti pemerintah, pengembang, masyarakat korban penggusuran, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Hal ini kurang mendapat perhatian dalam hasil studi pustaka yang ada.

4) Perspektif Masyarakat Korban

Peneliti juga ingin memberikan perhatian khusus pada perspektif masyarakat korban penggusuran, bagaimana mereka memperjuangkan hak dan kompensasi, serta strategi yang mereka gunakan untuk melawan penggusuran. Aspek ini tampaknya belum banyak dibahas dalam hasil studi pustaka yang dikumpulkan.

Dengan demikian, penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dari hasil studi pustaka yang ada, sehingga dapat memberikan perspektif baru dan informasi yang lebih komprehensif dalam

memahami dinamika dan resolusi konflik dalam kasus penggusuran akibat pembangunan infrastruktur pemerintah.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Konflik dan Konflik Kepentingan

1.6.1.1. Konflik

Konflik dalam konteks sosial adalah ketidaksepakatan atau pertentangan antara individu, kelompok, atau entitas dalam masyarakat. Suatu konflik terjadi karena melibatkan perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan yang mengakibatkan perseteruan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks konflik, terdapat konflik yang dapat diselesaikan, tetapi juga ada yang tidak dapat diselesaikan dan berpotensi mengarah ke tindakan kekerasan. Faktor-faktor yang memicu konflik meliputi kesamaan dan perbedaan kepentingan.

Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional (Schwarz, 1960).

Konflik sosial merupakan fenomena sosial yang menarik dikaji dan diteliti. Hal ini memunculkan berbagai teori konflik. Banyaknya pendapat ahli mengenai teori konflik membutuhkan pemetaan untuk memudahkan dalam mengenal dan memahami berbagai teori konflik yang ada. Secara

sederhana, teori konflik dapat dikelompokkan ke dalam dua hal yaitu klasik dan modern. Tokoh-tokoh teori konflik sosiologi klasik adalah sebagai berikut Polybus, Ibnu Khaldun, Nicolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes. Adapun, tokoh sosiologi modern yang mengemukakan tentang teori konflik adalah Karl Marx, Lewis A. Coser, Ralf Dahrendorf.

Perkembangan pandangan konflik hingga saat ini memiliki dua tahap keberlanjutan. Teori konflik klasik cenderung memandang konflik ditinjau dari segi sifat alami manusia yang cenderung saling memusuhi dan saling menguasai terutama dalam hal kekuasaan. Selanjutnya, teori konflik modern lebih bersifat kompleks dan muncul sebagai kritikan atas teori fungsionalisme struktural (Tualeka, 2017).

Karl Marx dalam teorinya menjelaskan konflik dalam bentuk pertentangan kelas. Masyarakat dilihat sebagai arena ketimpangan (*inequality*) yang mampu memicu konflik dan perubahan sosial serta adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Konflik kelas timbul karena adanya pertentangan kepentingan ekonomi yang dipicu perbedaan akses terhadap sumber daya kekuasaan, yakni modal. Dalam masyarakat kapitalis, hal tersebut berakibat pada dua kelas yang saling bertentangan, yaitu kelompok borjuis dan proletariat. (Susan, 2019)

Selanjutnya, menurut Ralf Dahrendorf konflik akan muncul melalui relasi-relasi dalam sistem. Oleh karena itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dengan sistem. Teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf ini

memaparkan bahwa relasi-relasi di struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan mereka yang tidak berkuasa. Dalam pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak dapat terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. (Susan, 2019)

Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang semakin mulai merebak (Raho, 2007). Teori konflik sosial memandang antar elemen sosial memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Perbedaan kepentingan dan pandangan tersebut yang memicu terjadinya konflik sosial yang berujung saling mengalahkan, melenyapkan, memusnahkan diantara elemen lainnya. Oleh karena itu, konflik yang terjadi tidak akan pernah lepas dari sebuah kepentingan yang ingin dicapai.

Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya, manusia di dunia ini pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antar perorangan sampai antar negara. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendominasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan. Namun, dalam catatan sejarah masyarakat dunia, konflik sering diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian.

1.6.1.2. Faktor-Faktor Terjadinya Konflik

Menurut Asley M. dalam Peter du Toit (2000) konflik timbul saat beberapa pihak percaya aspirasi mereka tidak dapat diraih bersama-sama dan merasa adanya perbedaan dalam tata nilai, kebutuhan, atau kepentingan. Kemudian, pendapat juga dikemukakan oleh Lewis A. Coser (1964) mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Coser memberikan dua dasar yang melatarbelakangi terjadinya konflik sebagai berikut:

1) Konflik Realistis

Konflik yang timbul karena adanya kekecewaan individu maupun kelompok terhadap berbagai bentuk permasalahan dalam hubungan sosial.

2) Konflik Non-Realistis

Terciptanya konflik karena adanya kebutuhan untuk melepaskan ketegangan dari salah satu atau dua pihak yang sedang berkonflik.

Adapun, penjelasan mengenai akar konflik yang dikemukakan oleh Mitchell et al. (2003). Akar-akar konflik tersebut meliputi empat aspek, yakni:

- 1) Perbedaan pengetahuan dan pemahaman.
- 2) Perbedaan nilai.
- 3) Perbedaan kepentingan.
- 4) Persoalan pribadi atau latar belakang sejarah.

1.6.1.3. Proses Konflik

Konflik terjadi melalui serangkaian tahapan yang spesifik. Menurut Fisher (2001) terdapat alat bantu untuk menganalisis situasi konflik yang terbagi menjadi lima tahap, diantaranya:

1) Pra-Konflik

Awal terjadi ketidaksesuaian antara kedua pihak atau lebih sehingga timbul konflik tersembunyi atau masih belum terbuka. Pada tahapan ini, terdapat ketegangan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

2) Konfrontasi

Situasi konflik yang terjadi semakin terlihat upaya untuk saling menyerang karena masing-masing pihak saling mengumpulkan sumber daya dan kekuatan untuk dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Pada tahap ini, hubungan antara kedua pihak menjadi sangat tegang dan mengarah pada polarisasi diantara para pendukung masing-masing pihak. Jika salah satu pihak dinilai salah, maka berpotensi kelompok lawan melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontasi lainnya.

3) Krisis

Tahap krisis merupakan klimaks dari konflik yang terjadi ketika ketegangan atau kekerasan terjadi paling hebat. Pada tahap ini, komunikasi kedua pihak terputus dan masing-masing pihak pendukung saling menuduh dan menentang.

4) Akibat

Pada tahap akibat, tingkat ketegangan konfrontasi dan kekerasan mulai menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian. Satu pihak berhasil menaklukkan lawannya atau salah satu pihak menyerah atas desakan pihak lawan. Hubungan kedua pihak pada fase ini memungkinkan kesempatan bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan pihak lain sebagai perantara.

5) Pasca-Konflik

Tahap akhir konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan kedua pihak menjadi normal kembali. Namun, jika isu-isu dan masalah saling bertentangan tersebut tidak diatasi dengan baik maka tahap ini sering kembali menjadi situasi pra-konflik.

1.6.1.4. Resolusi Konflik

Konflik merupakan realitas kehidupan yang tak terhindarkan. Konflik melekat erat dalam jalinan kehidupan. Seberapa besar ataupun kecil penyebabnya, kemungkinan terjadinya konflik tidak dapat dihindari. Hal yang dapat dilakukan terhadap konflik adalah memecahkannya, walaupun dalam pemecahannya terdapat dampak positif maupun negatif yang tidak dapat dihindari. Pembahasan mengenai "memecahkan" umumnya bersifat negatif, karenanya istilah "manajemen konflik" sering digunakan untuk menyelesaikan konflik.

Manajemen konflik adalah proses antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau pihak ketiga menyusun dan menerapkan strategi untuk mengendalikan konflik dengan tujuan menghasilkan resolusi yang diinginkan (Wirawan, 2010). Dengan demikian, solusi terhadap konflik dapat dicapai melalui manajemen konflik, dengan memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari proses tersebut.

Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa ada upaya atau strategi yang dilakukan untuk memperhatikan asal-usul konflik dan mencari solusi penyelesaiannya. Upaya ini bermakna tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dan memungkinkan mereka untuk mengakhiri konflik dengan melibatkan pencapaian kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Tujuan utama resolusi konflik adalah mentransformasi konflik yang berpotensi atau sedang berlangsung menjadi perubahan sosial dan politik yang damai, tanpa kekerasan.

Resolusi konflik merupakan proses untuk mencapai penyelesaian konflik dengan menggunakan resolusi konflik. Dikutip dari buku *How to Manage Conflict*, Edisi Ketiga *Win-Win Solution* (2001) terdapat lima pendekatan dalam manajemen yang telah diakui secara luas. Tidak ada satu pendekatan yang dapat menjamin efektivitas untuk semua kondisi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan kemampuan untuk memilih dan menerapkan gaya manajemen yang sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Diagram di bawah ini menunjukkan lima gaya penanganan konflik. Individu yang memahami semua gaya ini dapat memilih gaya yang paling cocok untuk mengatasi konflik tertentu. Setelah gaya yang tepat dipilih, pemahaman tentang motivasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat ditingkatkan.



Gambar 5. Diagram Lima Gaya Penanganan Konflik

Sumber: *How to Manage Conflict*, Edisi Ketiga *Win-Win Solution*, 2001

1) *Collaborating* (Kolaborasi)

Kolaborasi merupakan metode menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak (*win-win solution*). Gaya ini menekankan pada pembentukan situasi yang memungkinkan tujuan dicapai dan diterimanya oleh semua pihak. Dalam proses kolaborasi, semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan yang memuaskan dengan memperhatikan kepentingan masing-masing.

2) *Avoiding* (Menghindar)

Gaya ini menekankan pada pengetahuan di mana individu atau organisasi secara umum cenderung menghindari konflik dengan menghindari berbagai hal sensitif yang berpotensi menyebabkan konflik. Menghindari konflik dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menjaga lingkungan bebas dari konflik terbuka. Namun, aspek negatif dari gaya ini adalah bahwa hal ini dapat menyebabkan masalah kepada orang lain dan mengesampingkan masalah dengan menarik diri atau bersembunyi untuk menghindari konflik.

3) *Accommodating* (Mengakomodasi)

Akomodasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik, memungkinkan organisasi untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak, meskipun dengan mengutamakan kepentingan salah satu pihak yang berkonflik. Gaya ini dianggap kurang tegas karena cenderung lebih kooperatif, mengabaikan kepentingan sendiri demi kepentingan orang lain.

4) *Competing* (Kompetisi)

Kompetisi adalah gaya yang mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dalam upaya memenangkan kepentingan mereka masing-masing. Gaya ini berfokus pada kekuasaan, di mana satu pihak memiliki potensi untuk

mendominasi konflik dengan menggunakan kekuasaan mereka. Dalam konteks ini, terdapat satu pihak yang akan kalah dalam konflik, karena kompetisi seringkali menghasilkan kemenangan satu sisi dan kekalahan pihak lain. Kompetisi dianggap kurang efektif ketika ada satu pihak yang secara signifikan lebih kuat dari pihak lain, karena kekuatan yang tidak seimbang dapat menghasilkan hasil yang tidak adil dan tidak memuaskan bagi pihak yang kalah.

5) *Compromising* (Kompromi)

Kompromi adalah metode penyelesaian konflik yang melibatkan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*). Dalam proses ini, setiap pihak memiliki sesuatu untuk ditawarkan dan sesuatu untuk diterima, menciptakan jalan tengah yang memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Kompromi berfokus pada pencarian kebaikan bersama, memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, dan menghasilkan solusi yang tidak menimbulkan konflik baru.

Selanjutnya, Wirawan (2009) mengelompokkan metode resolusi konflik menjadi dua, yaitu melalui pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau dengan pihak ketiga (*third party intervention*).

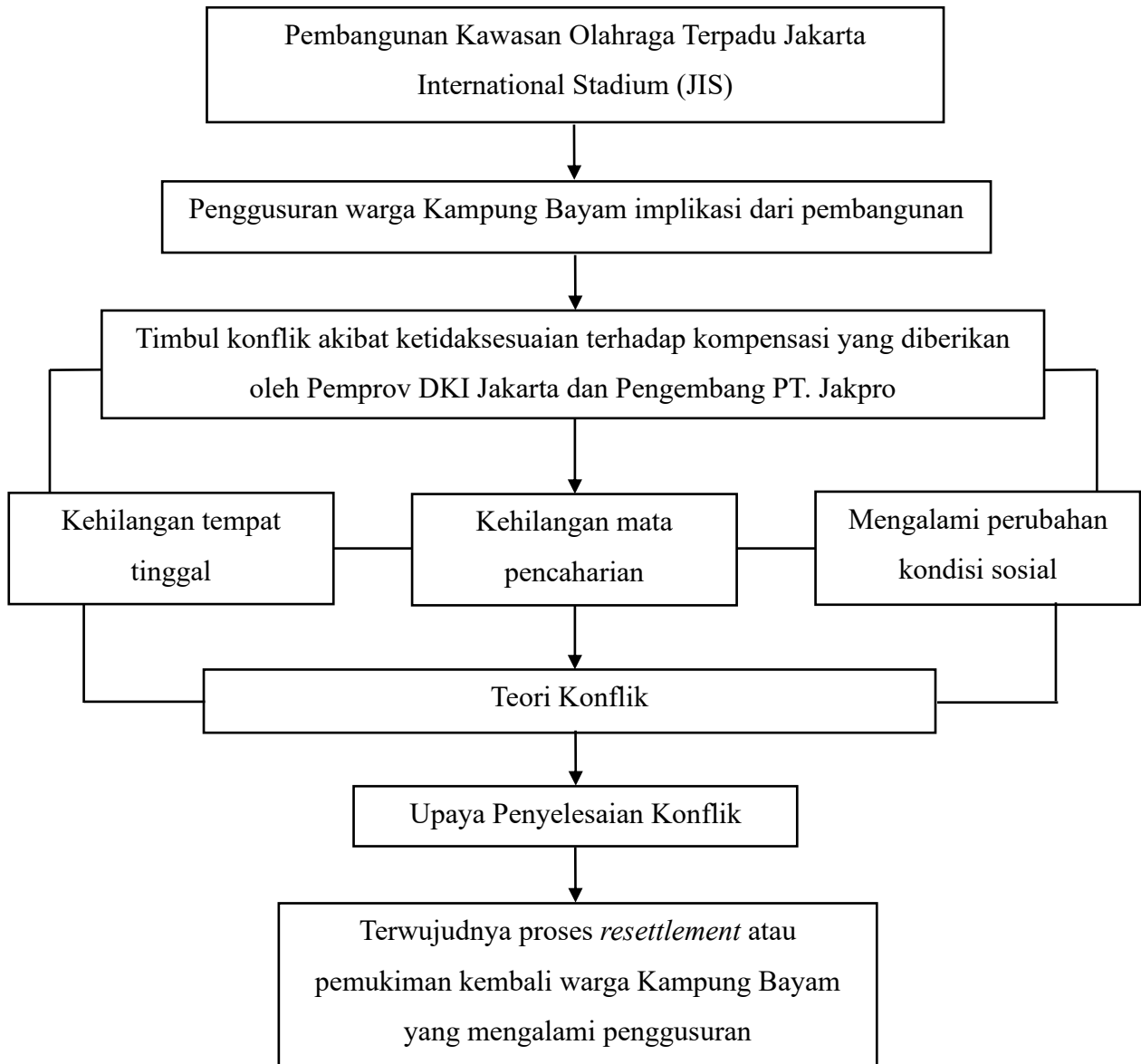
1) Pengaturan Sendiri (*self regulation*)

Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik yang terjadi. Dalam metode ini, pihak-pihak yang terlibat konflik berusaha menyusun strategi untuk mencapai tujuan, Pihak-pihak yang terlibat saling melakukan pendekatan untuk menyelesaikan dan menciptakan keluaran konflik yang diinginkan. Hal yang dapat dilakukan adalah melalui interaksi konflik dengan tujuan mendominasi (*win-lose solution*), interaksi konflik dengan tujuan kompromi (*win-win solution*), interaksi konflik menghindar, interaksi konflik mengakomodasi, serta resolusi konflik dengan dan atau tanpa kekerasan.

2) Intervensi pihak ketiga (*third-party intervention*)

Seringkali pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama dan menghabiskan sumber daya yang ada, sehingga intervensi pihak ketiga dibutuhkan untuk mencapai resolusi konflik. Intervensi pihak ketiga dapat dilakukan melalui: (1) proses pengadilan; (2) proses atau pendekatan legislasi; (3) proses administrasi; dan (4) resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution-ADR*) yang didalamnya terdapat rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

1.7. Kerangka Berpikir



1.8. Definisi Konsep

1.8.1. Konflik dan Konflik Kepentingan

Konflik dalam konteks sosial adalah ketidaksepakatan atau pertentangan antara individu, kelompok, atau entitas dalam masyarakat. Suatu konflik terjadi karena melibatkan perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan yang mengakibatkan perseteruan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks konflik, terdapat konflik yang dapat diselesaikan, tetapi juga ada yang tidak dapat diselesaikan dan berpotensi mengarah ke tindakan kekerasan. Faktor-faktor yang memicu konflik meliputi kesamaan dan perbedaan kepentingan.

Perkembangan pandangan konflik hingga saat ini memiliki dua tahap keberlanjutan. Teori konflik klasik cenderung memandang konflik ditinjau dari segi sifat alami manusia yang cenderung saling memusuhi dan saling menguasai terutama dalam hal kekuasaan.

1.9. Operasionalisasi Konsep

Tabel 2. Operasionalisasi Konsep

Variabel	Aspek/Kriteria	Indikator
Konflik Kepentingan	Faktor-faktor Konflik	a. Faktor terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah dan pengelola dengan warga eks-Kampung Bayam. b. Bentuk permasalahan dalam hubungan sosial akibat penggusuran. c. Perbedaan nilai atau kepentingan yang dipertahankan. d. Dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan akibat penggusuran
	Proses Konflik	a. Situasi pra-konflik antara pemerintah dan pengelola dengan warga eks-Kampung Bayam. b. Tingkat konfrontasi atau awal munculnya ketegangan akibat penggusuran hingga konflik muncul ke permukaan. c. Tingkat krisis atau klimaks konflik kepentingan antara pemerintah dan pengelola dengan warga eks-Kampung Bayam. d. Tingkat akhir konflik dan keputusan terhadap hasil negosiasi kompensasi antara pihak yang terlibat.
	Keterlibatan Lembaga dan Aktor Kunci	a. Peran aktor Pemprov DKI Jakarta selaku pemilik infrastruktur JIS dalam mengatasi konflik. b. Peran aktor PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola pembangunan JIS. c. Peran aktor Walikota Administrasi Jakarta Utara selaku pengamat

		pembangunan JIS. d. Peran aktor organisasi non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap konflik antara pemerintah dan pengelola, dengan warga Kampung Bayam.
	Resolusi Konflik	a. Gaya manajemen konflik yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi konflik. b. Upaya Pemprov DKI Jakarta mengenai kebijakan kompensasi terhadap warga eks-Kampung Bayam. c. Bentuk negosiasi yang dihasilkan melalui kompromi untuk mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak (<i>win-win solution</i>).

1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan data dalam setting yang alamiah dan bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada situasi di mana peneliti sebagai alat kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulannya adalah triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Anggito & Setiawan, 2018:8).

Dalam penelitian kualitatif umumnya proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen seperti bentuk

dokumentasi foto dan video. Menurut Creswell (2016:254) dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan perjalanan langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas di lokasi penelitian, sekaligus menggabungkan analisis dokumen, wawancara, dan observasi lapangan.

Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menginvestigasi fakta di lapangan mengenai masalah penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap warga Kampung Bayam serta meneliti konflik yang terjadi antara Pemprov DKI Jakarta dan pengelola infrastruktur PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), dengan pihak warga Kampung Bayam.

1.10.2. Situs Penelitian

Lokasi penelitian berada lokasi berdirinya Jakarta International Stadium (JIS), yang terletak di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memperoleh data dan informasi mengenai proses konflik dan implikasi terhadap relokasi paksa warga Kampung Bayam akibat pembangunan infrastruktur Jakarta International Stadium (JIS). Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui eskalasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari penggusuran, termasuk perubahan dalam kehidupan sehari-hari, peningkatan atau penurunan akses terhadap sumber daya, perubahan identitas dan hubungan sosial warga kampung bayam.

1.10.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling* yakni informan merupakan pihak yang berkaitan dan mengetahui permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian fenomena relokasi paksa ini, peneliti menggunakan informan yang

terlibat langsung sebagai aktor dalam proses penanganan masyarakat eks-kampung bayam yang harus dipenuhi hak kompensasinya oleh Pemprov DKI Jakarta dan pengelola PT. Jakarta Propertindo (Jakpro).

1.10.4. Jenis Data

Data merupakan keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan topik penelitian ini, maka jenis data yang relevan untuk digunakan sebagai landasan mengkaji fenomena yaitu melalui pendekatan kualitatif deskriptif.

1.10.5. Sumber Data

Sumber penyajian data yang peneliti lakukan adalah melalui jenis data primer dan sekunder. Berikut adalah penjelasan mengenai data primer dan sekunder:

1.10.5.1. Data Primer

Menurut Arikunto (2013:22) data primer adalah data berupa ucapan atau bahasa lisan, gerak tubuh atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data primer yang diambil oleh peneliti adalah wawancara pihak yang terlibat, observasi mendalam (*in depth interview*), dan analisa dokumen sebagai pelengkap hasil dari penelitian.

1.10.5.2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:255) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer yang bisa didapatkan melalui pemahaman dari berbagai sumber visual atau tulisan seperti literatur, buku, jurnal, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki variabel sama dengan riset yang dilakukan.

1.10.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016:224). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini menggunakan teknik wawancara (interview), analisis dokumentasi dalam bentuk foto dan video, serta studi pustaka. Berikut penjelasan dari teknik pengumpulan data tersebut:

1.10.6.1. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkonstruksikan opini, perasaan, emosi pihak yang terlibat di lapangan. Di sisi lain, Lincoln dan Guba (2008: 1270) memaparkan bahwa wawancara merupakan kegiatan mengkonstruksi segala sesuatu tentang narasumber yang bertujuan untuk memahami pengalaman narasumber bersangkutan.

Secara garis besar teknik wawancara terbagi menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, observer menggunakan pertanyaannya sendiri untuk diajukan, dengan

tujuan untuk menemukan jawaban hipotesis. Pertanyaan disusun secara ketat dan diajukan pada setiap subjek sama. Sedangkan, wawancara tidak terstruktur adalah pertanyaan wawancara yang tidak disiapkan terlebih dahulu, atau dengan kata lain tergantung situasi di lapangan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada informan dari institusi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan satuan warga yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian. Secara keseluruhan, berikut adalah pihak-pihak yang memberikan informasi dalam penelitian ini:

1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemilik dari Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium (JIS) yang dibangun di Jakarta Utara. Kantor Balaikota Provinsi DKI Jakarta berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9, Jakarta Pusat, Jakarta Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 05 November 2024, dengan narasumber yang diwawancarai langsung oleh peneliti dari Pemprov DKI Jakarta adalah:

- a) Zulfikri Alaidrus S.Sos, M.Si, selaku Ketua Kelompok Penataan Ruang Cipta Karya dan Pertanahan Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2) Walikota Administrasi Jakarta Utara

Walikota Administrasi Jakarta Utara merupakan salah satu institusi pemerintah yang melakukan pengawasan dalam konflik penggusuran warga Kampung Bayam akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 27-29, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 04 November 2024, dengan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti dari Walikota Administrasi Jakarta Utara adalah:

- a) RD, Sony Triwibawa S.H, M.Pd, selaku Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Walikota Administrasi Jakarta Utara.

3) Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta

Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan aktif pada isu sosial perkotaan. Dalam hal ini, JRMK Jakarta selaku pengamat konflik sekaligus pendamping warga Kampung Bayam dalam penuntasan relokasi warga yang mengalami penggusuran. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 November 2024, dengan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti dari JRMK Jakarta adalah:

- a) Minawati selaku Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta

4) Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB)

Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB) sebagai satuan warga Kampung Bayam yang mengalami dampak penggusuran. Satuan PWKB membentuk struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, pengurus koperasi, dan koordinator kelompok. Satuan PWKB saat ini bertempat tinggal di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 Juni 2024, dengan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti dari PWKB adalah:

- a) Sherly selaku Ketua Perkumpulan Warga Kampung Bayam (PWKB)

1.10.6.2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa karya dan gambar tulisan. Bentuk tulisan seperti: catatan harian, sejarah hidup, cerita, riwayat hidup, peraturan, kebijakan. Dalam bentuk gambar, misalnya: foto, gambar hidup, sketsa. Bentuk gambar, misalnya: karya seni berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2005:82).

Teknik dokumentasi ini merupakan pelengkap dari metode wawancara peneliti sebagai bahan informasi sekunder sehingga mampu meningkatkan kredibilitas hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data berupa dokumen seperti ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang sudah terjadi di masa lalu. Melalui metode

dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan gambar dan catatan harian selama melakukan penelitian kepada narasumber yang bersangkutan.

1.10.6.3. Studi Pustaka

Teknik kepastakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepastakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan topik penelitian. Pada metode ini, peneliti mendapatkan data tambahan melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian.

Melalui metode studi Pustaka, peneliti dapat memperkaya tulisan dengan mengumpulkan data dari pembacaan literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian konflik warga Kampung Bayam akibat penggusuran.

1.10.7. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2016:88) mendefinisikan analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007).

Menurut Miles dan Huberman mengklasifikasikan aktivitas analisis dan interpretasi data sebagai berikut (Sugiyono, 2016):

- 1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi terhadap data-data hasil penelitian yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan memfokuskan pada hal-hal penting untuk dianalisis. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terkait data yang terkumpul sehingga dapat menyajikan gambaran yang lebih rinci dari fenomena yang diteliti. Dalam proses reduksi data ini, segala hal yang tidak termasuk ke dalam fokus penelitian mengenai adanya konflik yang terjadi terhadap relokasi paksa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat Kampung Bayam implikasi dari pembangunan infrastruktur Jakarta International Stadium harus dihilangkan agar pembahasan tetap sesuai dengan rumusan yang dibuat.

2) Display Data

Display atau penyajian data merupakan penyajian data hasil penelitian yang disusun secara rinci untuk memberikan gambaran terkait fenomena yang diteliti secara utuh. Peneliti akan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang digunakan penulis dalam melihat sudut pandang kasus yang diambil oleh penulis. Dengan dilakukan analisis data dan teori yang digunakan, peneliti akan mengolah data di lapangan mengenai proses konflik serta mendapatkan pengetahuan terhadap resolusi konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat.

3) Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dari proses analisis data, setelah melalui tahap reduksi dan display data maka dihasilkan kesimpulan

terkait data yang telah dianalisis menggunakan teori yang digunakan, kemudian dilakukan verifikasi atau proses uji validitas terhadap kesimpulan yang dihasilkan. Dengan menyimpulkan hasil penelitian akan memudahkan pembaca dalam memahami proses berjalannya pengusuran warga Kampung Bayam. Di sisi lain, pembaca dapat mengetahui dua kepentingan yang dipertahankan oleh Pemprov DKI Jakarta dan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), dengan warga Kampung Bayam yang menjadi korban pengusuran implikasi dari pembangunan infrastruktur Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium (JIS).

1.10.8. Kualitas Data

Data-data yang telah terkumpul perlu diuji keasliannya. Keaslian data sangat penting untuk menjamin data yang diperoleh dapat dinyatakan valid atau tidak, data harus diuji karena peneliti bertanggung jawab atas kebenaran data yang dikumpulkannya. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan melakukan pengumpulan dan pengecekan keabsahan data yang didapatkan dari sumber yang berbeda-beda, diantaranya menggunakan sumber data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

- a) Membandingkan data yang diperoleh dari pengamatan dengan data yang diperoleh dari wawancara;

- b) Membandingkan pernyataan orang di depan umum dengan pernyataan pribadi mereka;
- c) Membandingkan pernyataan orang tentang situasi penelitian dengan pernyataan mereka sepanjang waktu; dan
- d) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang relevan.